Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi di era modern saat ini sangatlah pesat. Segala proses dan informasi dalam suatu perusahaan seperti, pencatatan data perusahaan, keuangan, dan surat menyurat telah melalui sebuah sistem yang terpusat dan dilakukan secara daring (Nurul, 2016). Sistem merupakan salah satu hal penting dalam proses bisnis perusahaan. Sistem informasi dapat menghemat biaya operasional kantor, kegiatan kantor menjadi lebih efisien, dan data-data akan tersimpan lebih aman dalam sistem. Akan tetapi, menurut hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), terdapat 54% masyarakat yang kurang paham akan isu ilmu pengetahuan dan teknologi (Yudha, 2015). Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isu ilmu pengetahuan dan teknologi disebabkan karena masyarakat belum terbiasa dalam melakukan kegiatan berbasis sistem, karena kegiatan di perusahaan masih banyak dilakukan secara manual. Hal tersebut berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat terkait perubahan suatu sistem yang semula manual menjadi online.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan suatu badan hukum publik yang memberikan perlindungan berupa jaminan sosial kepada seluruh pekerja Indonesia. Ketenagakerjaan memiliki beberapa sistem informasi berupa website yang dapat diakses oleh masyarakat yaitu, bpjsketenagakerjaan.go.id yang memuat seluruh informasi umum mengenai BPJS Ketenagakerjaan dan Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) Online yang berisi tentang pelaporan data perusahaan kepada BPJS. Kemudian terdapat satu sistem yang hanya dapat diakses oleh karyawan di BPJS Ketenagakerjaan yaitu Sistem Informasi Perlindungan Pekerja (SMILE), yang memuat seluruh informasi dari semua peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dari seluruh sistem informasi yang dimiliki oleh BPJS, yang dapat digunakan untuk proses pendaftaran badan usaha yaitu bpisketenagakerjaan.go.id dan SMILE. Akan tetapi, pada kenyataannya berdasarkan data hasil rekapitulasi pendaftaran usaha banyak masyarakat yang kurang memahami memanfaatkan teknologi tersebut, sehingga ada beberapa badan usaha yang terkendala dalam proses pendaftaran sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun, suatu badan usaha diwajibkan untuk mengikuti program dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004, jika suatu badan usaha tidak mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan maka akan mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Kendala yang dihadapi yaitu badan usaha yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan karena bingung dan ragu terkait prosedur pendaftaran dan cara pembayaran iurannya. Hal ini dapat terlihat pada hasil rekapitulasi pendaftaran badan usaha di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Cirebon per Maret 2022, baru 95% dari total 9.825

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

badan usaha di Kota Cirebon dan yang sudah terdaftar sebesar 9.323 badan usaha, sedangkan sisanya sebanyak 502 badan usaha belum terdaftar. Dari 95% badan usaha yang terdaftar, terdapat 154.364 tenaga kerja yang terdaftar. Sedangkan dari data Badan Pusat Statistik Cirebon terdapat sekitar 220.000 data tenaga kerja non PNS yang aktif per tahun 2021. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Cirebon dapat diartikan bahwa masih terdapat 66.000 tenaga kerja yang belum terdaftar sebagai peserta dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian dari 95% data tersebut berdasarkan hasil observasi pada layanan customer service bidang kepesertaan selama bulan Januari-Maret 2022, terdapat penambahan peserta baru sebesar 204 badan usaha. Sehubungan dengan itu, terdapat 4% atau sebesar 9 badan usaha yang baru mendaftar mengalami kesulitan saat pembayaran iuran. Kesulitan tersebut karena ketidaktahuan badan usaha mengenai prosedur pembayaran iuran dan adanya pergantian pegawai dalam badan usaha tersebut. Dari data tersebut dapat diartikan bahwa kurangnya wawasan masyarakat di Kota Cirebon mengenai prosedur pendaftaran dan pembayaran iuran calon peserta BPJS Ketenagakerjaan. Atas permasalahan tersebut, penulis akan membahasnya dalam tugas akhir yang berjudul "Sistem Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Badan Usaha di BPJS Ketenagakerjaan Kota Circon". Tujuan penulisan tugas akhir dengan judul ini yaitu, agar pembaca menjadi paham mengenai alur pendaftaran badan usaha, besaran penetapan iuran, cara pembayaran iuran dan penetapan peserta di BPJS Ketenagakerjaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan araian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana kebijakan atas pendaftaran badan usaha melalui sistem SMILE dan prosedur pembayaran iuran di BPJS Ketenagakerjaan Kota Cirebon?
- 2. Apa saja fungsi bidang yang terkait saat proses pendaftaran sampai adanya pembayaran iuran di BPJS Ketenagakerjaan Kota Cirebon?
- 3. Dokumen dan catatan apa yang diperlukan untuk pendaftaran dan pembayaran iuran badan usaha di BPJS Ketenagakerjaan Kota Cirebon?
- 4. Bagaimana prosedur dan bagan alir atau *flowchart* atas pendaftaran dan pembayaran iuran badan usaha di BPJS Ketenagakerjaan Kota Cirebon?
- 5. Bagaimana sistem pengendalian internal pada proses pendaftaran dan pembayaran iuran badan usaha di BPJS Ketenagakerjaan Kota Cirebon?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini ialah sebagai berikut :

- 1. Menguraikan kebijakan atas pendaftaran badan usaha melalui sistem SMILE dan pembayaran iuran di BPJS Ketenagakerjaan Kota Cirebon.
- 2. Menjelaskan fungsi yang terkait saat proses pendaftaran sampai adanya pembayaran iuran di BPJS Ketenagakerjaan Kota Cirebon.



Hak cipta

milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

3. Menjelaskan dokumen dan catatan yang diperlukan untuk pendaftaran dan pembayaran iuran badan usaha pada BPJS Ketenagakerjaan Kota Cirebon.

- 4. Menjelaskan prosedur dan bagan alir atau *flowchart* atas pendaftaran dan pembayaran iuran badan usaha di BPJS Ketenagakerjaan Kota Cirebon.
- 5. Menjelaskan sistem pengendalian internal pada proses pendaftaran dan pembayaran iuran badan usaha di BPJS Ketenagakerjaan Kota Cirebon.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini ialah sebagai berikut:

- 1. Bagi penulis, tugas akhir ini mampu menambah pengetahuan tentang prosedur pendaftaran dan pembayaran iuran badan usaha melalui sistem SMILE dan website yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.
- 2. Bagi pembaca, tugas akhir ini dapat dijadikan panduan dan referensi untuk menambah pengetahuan dan ilmu mengenai sistem akuntansi.
- 3. Bagi BPJS Ketenagakerjaan Kota Cirebon, tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam pengembangan sistem SMILE dan website yang digunakan di kantor dan dapat dijadikan ringkasan mengenai prosedur pendaftaran badan usaha.

